

STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENEKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Kasus Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Sumbawa)

Sherli Wardanny^{1*}, Aldi Apriansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: wardannysherli@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 24 Maret 2026 Accepted: 15 April 2026 Published: 30 April 2026	<i>Stunting is a public health problem that remains a serious challenge in Indonesia, including in Sumbawa Regency. Although various policies and programs have been implemented, the prevalence of stunting in Sumbawa Regency shows fluctuations and has not experienced a sustained decrease. This study aims to analyze the strategies of the Sumbawa District Health Office in reducing the decline in stunting and to identify the challenges faced in its implementation, particularly in Moyo Utara District and Sumbawa District as areas with relatively high stunting prevalence. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies, while data analysis was conducted descriptively and qualitatively. The research results indicate that the Sumbawa District Health Office's strategies include strengthening specific and sensitive nutrition interventions, optimizing basic health services through integrated service posts (posyandu) and the First 1,000 Days of Life (HPK) program, cross-sector collaboration, and utilizing data-based nutrition information systems. However, the implementation of this strategy still faces various challenges, including limited human resources in nutrition, low public participation and awareness, as well as disparities in access to health services in rural areas. This study concludes that the success of reducing stunting requires strengthening cross-sector coordination, increasing resource capacity, and empowering the community sustainably.</i>
Keywords Stunting; Policy Implementation; Public Policy.	

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama di tingkat global, nasional, maupun lokal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak usia 0-5 tahun, terutama di masa *golden age*. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar usia menurut pertumbuhan normal. Masalah stunting ini tidak hanya berdampak pada kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas masa depan, dan beban ekonomi negara. Faktor penyebab utama meliputi pola makan tidak seimbang, sanitasi buruk, dan akses layanan kesehatan yang terbatas, terutama di daerah pedesaan (Fauziah *et al.*, 2024).

Secara global, prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun mencapai 22 persen atau sekitar 149 juta anak pada tahun 2020, dengan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara sebagai wilayah yang paling terdampak. Di Indonesia, masalah stunting telah menjadi isu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting di Indonesia saat ini di angka 21,5 persen. Angka ini hanya turun 0,1 persen dari data Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2022 yang sebesar 21,6 persen. Realisasi penurunan stunting dapat dikatakan masih jauh dari target sebesar 14 persen pada tahun 2024 (Muslih *et al.*, 2025).

Kebijakan nasional percepatan penurunan stunting telah diarahkan melalui pendekatan holistik, integratif, dan berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengatur strategi nasional, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pendanaan. Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025–2029 disusun sebagai panduan langkah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai target intervensi stunting pada tahun 2029. Dengan demikian, pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan, memiliki posisi strategis sebagai pelaksana teknis, penggerak layanan kesehatan dasar, sekaligus koordinator intervensi gizi spesifik di tingkat wilayah (Sa'adah *et al.*, 2025).

Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, permasalahan stunting masih memerlukan perhatian serius. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah lokus stunting di NTB menunjukkan fluktuasi prevalensi dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa sebesar 29,7 persen pada tahun 2022, menurun menjadi 25,7 persen pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 29,8 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam mempertahankan tren penurunan stunting secara berkelanjutan. Faktor penyebab utamanya meliputi tingkat kemiskinan yang masih tinggi, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi seimbang (Suryani dan Rizqiya, 2023).

Terdapat 11 desa di 10 kecamatan sebagai lokus intervensi tahun 2025. Desa-desanya tersebut antara lain Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, Desa Labuan Bajo dan Stowe Brang Kecamatan Utan, Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas, Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh, Desa Sukamulya Kecamatan Labangka, Desa Lebangkar Kecamatan Ropang, Desa SP III Prode Kecamatan Plampang, Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk, dan Desa Simu Kecamatan Maronge. Lokus intervensi stunting merupakan lokasi prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk dilakukan percepatan penurunan stunting melalui intervensi terkoordinasi lintas sektor. Penetapan desa sebagai lokus intervensi didasarkan pada hasil pemantauan prevalensi balita stunting, kondisi sanitasi dan akses air bersih, tingkat kemiskinan, serta rendahnya cakupan layanan kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, desa-desa tersebut dipilih karena masih menunjukkan tingginya kasus stunting dan rendahnya capaian indikator kesehatan dasar, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi khusus dari pemerintah daerah bersama lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa (Attamimi *et al.*, 2024).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa memiliki peran penting dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik, seperti pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, imunisasi, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, edukasi gizi, serta penguatan layanan posyandu dan puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa penurunan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif, dengan intervensi spesifik berada pada ranah Dinas Kesehatan, sedangkan intervensi sensitif melibatkan OPD lain. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu didukung oleh kerja kolaboratif dengan Bappeda, Dinas P2KBP3A, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan keluarga.

Sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Dalam implementasinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa berperan sebagai pelaksana utama melalui sejumlah strategi dan program lintas sektor, yaitu, Peningkatan intervensi gizi spesifik dan

sensitif, seperti Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil dengan gizi kurang, Promosi dan pendampingan pemberian ASI eksklusif serta edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), Optimalisasi layanan Kesehatan dasar melalui Penguatan posyandu aktif di setiap desa dan pengawasan tumbuh kembang anak setiap bulan, Pelaksanaan Gerak 1.000 HPK secara terintegrasi dengan sektor Pendidikan dan sosial, Kolaborasi lintas sektor dengan OPD lain seperti Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan untuk mendukung penyediaan sarana air bersih, jamban sehat, dan edukasi gizi di sekolah, Pemantauan dan evaluasi berbasis data, dengan penggunaan aplikasi e- PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) untuk memperkuat system informasi gizi daerah.

Kajian terbaru juga menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan di tingkat layanan kesehatan primer. Studi tentang implementasi kebijakan stunting di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya berada pada desain kebijakan, tetapi juga pada komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, kejelasan pelaksanaan, mekanisme umpan balik, serta koordinasi lintas sektor di tingkat puskesmas dan masyarakat. Hambatan seperti keterbatasan tenaga, pendanaan, birokrasi yang kaku, dan dominannya pendekatan top-down dapat mengurangi efektivitas program apabila tidak diimbangi dengan strategi adaptif berbasis kondisi lokal (Suprpto *et al.*, 2026).

Beberapa artikel terbaru memperkuat pentingnya strategi kolaboratif dan berbasis komunitas dalam penurunan stunting. Penelitian Ramdani dan Adnan (2025) menunjukkan bahwa strategi komunikasi Dinas Kesehatan melalui kegiatan posyandu penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penelitian Ola *et al.* (2025) tentang strategi Dinas Kesehatan di Kabupaten Flores Timur juga menegaskan bahwa strategi organisasi, strategi program, dukungan sumber daya, dan kelembagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam penanganan stunting. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa program yang sudah berjalan belum selalu otomatis menurunkan prevalensi apabila masih terdapat keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kendala perilaku dan struktural di lapangan.

Selain itu, penelitian Mulyani *et al.* (2024) menekankan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam mengatasi stunting perlu mencakup tujuan yang jelas, pemahaman lingkungan, arah kebijakan, tindakan program, serta pengukuran hasil. Kajian Bela (2025) juga menunjukkan bahwa meskipun angka stunting nasional bergerak ke arah positif, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan sehingga intervensi pemerintah perlu lebih tepat sasaran dan didukung kolaborasi lintas sektor. Temuan ini relevan dengan Kabupaten Sumbawa yang memiliki karakteristik wilayah luas, variasi kondisi sosial-ekonomi, perbedaan akses layanan, serta tantangan literasi gizi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam menekan penurunan stunting serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Sumbawa sebagai wilayah dengan prevalensi stunting relatif tinggi. Strategi Dinas Kesehatan dalam menekan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa menjadi penting untuk dikaji secara mendalam untuk mengetahui bagaimana Dinas Kesehatan merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi strategi penurunan stunting, terutama dalam aspek intervensi gizi spesifik, penguatan posyandu dan puskesmas, edukasi perubahan perilaku, pemanfaatan data, serta kolaborasi lintas sektor. Kajian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual bagi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam menekan penurunan stunting di Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Sumbawa.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Puskesmas Moyo Utara, dan Puskesmas Sumbawa Unit II pada tahun 2025. Adapun subjek penelitian terdiri dari staf Dinas Kesehatan, koordinator gizi puskesmas, kader posyandu, kepala desa/lurah, dan orang tua dari anak stunting sebagai informan untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang strategi dan tantangan dalam penurunan stunting.

Pemilihan sekolah dan subjek penelitian ini sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan yang kuat bahwa desa-desa di Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Sumbawa masih menunjukkan tingginya kasus stunting dan rendahnya capaian indikator kesehatan dasar, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi khusus dari pemerintah daerah bersama lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci untuk menggali pemahaman tentang strategi yang diterapkan, filosofi program, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan strategi dan program guna menekan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Kedua, observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan strategi dan program di lapangan. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti data SSGI, laporan program, SOP, dan foto-foto kegiatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori manajemen strategi George R. Terry (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) untuk menganalisis strategi, dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam menekan penurunan stunting di Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Sumbawa.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Lokasi kegiatan penelitian berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda Kelurahan Lempeh email: dinkes.sumbawakab@gmail.com. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (Dinkes Kabupaten Sumbawa) adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa, Sumatera Utara. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, Dinkes Kabupaten Sumbawa bertugas melaksanakan berbagai program kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan kuratif, preventif, promotif, maupun rehabilitatif. Lembaga ini berkomitmen memberikan layanan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Kabupaten Kabupaten Sumbawa memiliki tantangan geografis yang khas, dengan daerah pegunungan dan desa-desa yang tersebar jauh dari pusat kota. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi Dinkes Kabupaten Sumbawa untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan. Melalui jaringan puskesmas, rumah sakit daerah, posyandu, layanan kesehatan keliling, serta tim siaga bencana, Dinkes Kabupaten Sumbawa berupaya memastikan semua warga, tanpa terkecuali, mendapatkan hak mereka atas akses kesehatan yang memadai. Selain memberikan layanan pengobatan, Dinkes Kabupaten Sumbawa juga fokus pada upaya preventif dan promotif. Program-program seperti imunisasi anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penyuluhan gizi, pencegahan stunting, pengendalian penyakit menular seperti TBC dan malaria, serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan menyeluruh ini, Dinkes Kabupaten Sumbawa berharap dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan secara mandiri.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Sumbawa percaya bahwa kesehatan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Melalui kerja keras, inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta dedikasi tinggi dari seluruh tenaga kesehatan, Dinkes Kabupaten Sumbawa terus berupaya menciptakan Kabupaten Kabupaten Sumbawa yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sejahtera bagi semua warganya, tanpa terkecuali.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam menekan penurunan stunting telah dilaksanakan melalui pendekatan yang relatif komprehensif dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam penyelenggaraan program kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting yang bersifat multidimensional.

Pada tahap perencanaan (*planning*), Dinas Kesehatan telah mengembangkan strategi berbasis data dengan memanfaatkan sistem informasi kesehatan seperti SIGIZIKESGA sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi dan memetakan kasus stunting di wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemanfaatan teknologi ini menjadi indikator adanya transformasi digital dalam tata kelola kesehatan, yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih terarah dan berbasis bukti (*evidence-*

based policy). Data yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk mengetahui tingkat prevalensi stunting, tetapi juga untuk menentukan kelompok sasaran prioritas serta merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Selain itu, perencanaan program juga telah mengacu pada kebijakan nasional yang menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pendekatan ini menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan stunting. Program-program yang dirancang mencakup intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, serta promosi ASI eksklusif, dan intervensi gizi sensitif yang berkaitan dengan sanitasi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara intervensi gizi spesifik dan sensitif belum sepenuhnya berjalan secara optimal di lapangan, sehingga dampak yang dihasilkan belum maksimal.

Pada aspek pengorganisasian (*organizing*), Dinas Kesehatan telah melibatkan berbagai pihak baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pelaksanaan program melibatkan tenaga kesehatan di puskesmas, bidan desa, serta kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, secara eksternal, terdapat kolaborasi lintas sektor dengan instansi lain seperti dinas sosial, dinas pendidikan, serta pemerintah desa yang berperan dalam mendukung keberhasilan program. Kolaborasi ini mencerminkan adanya upaya integrasi kebijakan dalam penanganan stunting. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih adanya ketidaksinkronan program serta kurangnya komunikasi antar instansi. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh sasaran, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Pada tahap pelaksanaan (*actuating*), Dinas Kesehatan telah menjalankan berbagai program yang mencerminkan pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Kegiatan posyandu menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan program, yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan ini, dilakukan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian imunisasi, serta edukasi kepada ibu terkait pola asuh dan gizi anak. Selain itu, pelaksanaan program juga didukung oleh kegiatan kunjungan rumah yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan posyandu.

Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting serta masih adanya kepercayaan dan kebiasaan yang tidak mendukung perilaku hidup sehat. Pemahaman yang terbatas menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program-program intervensi yang telah diselenggarakan.

Salah satu sumber menyatakan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui kader dan bidan desa, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut masih rendah, kemungkinan disebabkan oleh aktivitas masyarakat di kebun atau ladang pada saat kegiatan berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya komunikasi perlu disesuaikan dengan pola hidup dan ritme kerja masyarakat lokal agar dapat menjangkau mereka secara optimal.

Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan beberapa ibu menyusui dan kader posyandu, ditemukan bahwa masih terjadi kesalahan dalam pola asuh anak. Salah satu informan mengungkapkan bahwa kader telah memberikan edukasi mengenai makanan sehat untuk balita dan pentingnya ASI eksklusif, tetapi tidak semua ibu mengikuti

anjuan tersebut. Informan lain menyatakan bahwa bayinya yang berusia di bawah enam bulan telah diberi makanan tambahan seperti pisang dan air minum, yang seharusnya belum diberikan pada usia tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya miskonsepsi yang masih melekat dalam praktik pengasuhan anak di masyarakat.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program. Banyak keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi secara optimal, sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu diikuti dengan perubahan kondisi yang signifikan. Menurut salah satu informan, kendala finansial menyebabkan dirinya kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi dirinya dan anaknya, meskipun ia telah memahami pentingnya gizi seimbang. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya yang mengaku belum mengetahui informasi tentang stunting hingga mendapatkan bantuan pangan dan penjelasan dari petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan belum selalu diikuti dengan kemampuan untuk mengimplementasikan informasi yang diterima, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, ketidakdisiplinan dalam mengikuti anjuran kesehatan juga tercermin dalam pernyataan salah satu informan yang mengaku tidak rutin mengonsumsi suplemen kehamilan karena lupa. Informan lainnya juga menyatakan kekhawatiran untuk mengonsumsi obat karena memiliki riwayat hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kelembagaan juga perlu memperhatikan pendekatan individual yang sensitif terhadap kondisi kesehatan spesifik dan latar belakang masyarakat.

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang didominasi oleh wilayah pedesaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Akses terhadap layanan kesehatan di beberapa wilayah masih terbatas, baik dari segi jarak maupun ketersediaan fasilitas. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal, sehingga berdampak pada keberhasilan program secara keseluruhan.

Dalam aspek pengawasan (*controlling*), pengawasan dan evaluasi program dilakukan secara rutin melalui monitoring ke puskesmas dan pelaporan berkala berbasis aplikasi SIGIZI KESGA/E-PPGBM yang bersumber dari data posyandu. Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan menggunakan buku KIA dan KMS, disertai edukasi serta rujukan ke puskesmas apabila ditemukan gangguan pertumbuhan. Meskipun masih terdapat kendala seperti penolakan sebagian orang tua terhadap status stunting atau imunisasi, serta pola makan anak, keterlibatan kader, tenaga kesehatan, dan orang tua tetap mendukung keberlangsungan pemantauan dan penanganan stunting.

Namun demikian, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek komunikasi, sosialisasi telah dilakukan melalui pertemuan lintas sektor, posyandu, dan penyuluhan masyarakat dengan dukungan media edukasi. Namun, masih terdapat kendala berupa persepsi keliru masyarakat yang menganggap stunting sebagai hal biasa atau keturunan, rendahnya literasi kesehatan, dan keterbatasan akses informasi. Dari aspek sumber daya, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan logistik tergolong memadai, meskipun masih terdapat keterbatasan minor pada fasilitas penunjang posyandu.

Dari segi disposisi, program didukung oleh komitmen dan kepedulian yang kuat dari tenaga kesehatan dan kader yang bekerja secara kolaboratif tanpa perbedaan sikap maupun persepsi. Komitmen tersebut tercermin melalui koordinasi lintas sektor, kunjungan rumah, pemberian PMT, serta pelayanan yang ramah dan persuasif kepada orang tua balita stunting. Sementara dari aspek struktur birokrasi, koordinasi dan

pelaporan program telah berjalan jelas dan efektif dari posyandu, puskesmas, hingga Dinas Kesehatan melalui sistem SIGIZI KESGA, didukung regulasi dan SOP yang jelas serta pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), sehingga tidak ditemukan hambatan birokrasi yang signifikan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam menekan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa telah mencakup pelibatan multi-aktor, termasuk lembaga pendidikan dan tokoh adat, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di tingkat masyarakat. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang memegang potensi paling besar dalam menanggulangi stunting dan mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri. Faktanya, dalam praktik pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti faktor ekonomi, kendala akses informasi, komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan sumber daya pendukung, serta keterbatasan fasilitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan yang perlu diatasi secara sistemik. Untuk itu, diperlukan integrasi strategi kelembagaan dengan intervensi sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam menekan penurunan stunting telah dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan manajemen strategis yang meliputi perencanaan berbasis data, pengorganisasian yang terkoordinasi, pelaksanaan program inovatif, dan pengawasan berbasis sistem informasi. Intervensi dilakukan secara terintegrasi dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi gizi.

Pada tahap perencanaan (*planning*), Dinas Kesehatan telah mengembangkan strategi berbasis data dengan memanfaatkan sistem informasi kesehatan seperti SIGIZIKESGA sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi dan memetakan kasus stunting di wilayah Kabupaten Sumbawa. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), Dinas Kesehatan telah melibatkan berbagai pihak baik secara internal maupun eksternal. Kolaborasi ini mencerminkan adanya upaya integrasi kebijakan dalam penanganan stunting. Pada tahap pelaksanaan (*actuating*), Dinas Kesehatan telah menjalankan berbagai program yang mencerminkan pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Kegiatan posyandu menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan program, yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Pada tahap pengawasan (*controlling*), Dinas Kesehatan secara rutin melakukan pengawasan dan evaluasi melalui monitoring ke puskesmas dan pelaporan berkala berbasis aplikasi SIGIZI KESGA/E-PPGBM yang bersumber dari data posyandu.

Meskipun strategi yang diterapkan cukup baik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait faktor ekonomi, kendala akses informasi, komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan sumber daya pendukung, serta keterbatasan fasilitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan yang perlu diatasi secara sistemik. Untuk itu, diperlukan integrasi strategi kelembagaan dengan intervensi sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan. Penguatan strategi komunikasi yang lebih persuasif dan kontekstual, peningkatan kapasitas kader secara berkelanjutan, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan komitmen lintas sektor juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, S., & Pujiandi, W. (2024). *Manajemen Strategik*. Karawang: CV. Saba Jaya Publisher.
- Attamimi, H. R., Lestari, Y., Setianingsih, F., & Hamid, A. (2024). Studi Kasus: Pola Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023. *Jurnal Ners*, 8(2), 1618-1623.
- Bela, D. R. S. (2025). Meta-Analysis of Stunting Eradication Policy: A Review of National Policy Implementation Impact in Indonesia. *Journal of Social Growth and Development Studies*, 1(3), 130-142.
- Choliq, I., Nasrullah, D., & Mundakir, M. (2020). Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 31-40.
- David, F. R. (2005). *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauziah, J., Trisnawati, K. D., Rini, K. P. S., & Putri, S. U. (2024). Stunting: Penyebab, Gejala, dan Pencegahan. *Jurnal Parenting dan Anak*, 1(2), 1-11.
- Handayani, B. N., & Setyawati, I. (2022). Analisis Faktor Determinan Stunting Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Midwifery Update (MU)*, 4(2), 83-92.
- Hartono, M. S., Setiawan, K. H., Wirabrata, D. G. F., & Budiarta, I. W. (2024). Strategi Kebijakan Penanggulangan Stunting Melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi di Kabupaten Buleleng. *Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, 3(2), 1-15.
- Kiranasari, F., Tohardi, A., & Aisyah, S. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2216-2227.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, A., Hidayatullah, F., Rahmah, H., Sugiharta, S., Cordias, R., & Fujilestari, N. A. (2024). Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam Mengatasi Stunting. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 297-309.
- Muslihin, H. Y., Loita, A., Fauziah, Y., Rahmadani, N., Zaidah, W. N., & Masturoh, S. (2025). Deteksi Dini Gizi Kurang Dan Risiko Gagal Tumbuh: Urgensi Pemantauan Rutin Di Usia Golden Age. *Al-Athfal: STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 6(3), 378-389.
- Ola, P. S. M., Fernandez, D., Toda, H., & Nursalam. (2025). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Flores Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(10), 161-170.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 225-229.

- Ramdani, R., & Adnan, I. Z. (2025). Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan dalam Sosialisasi Penurunan Stunting Melalui Kegiatan Posyandu di Desa Cihuni. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 522-530.
- Sa'adah, F., Hakim, L., & Febriantin, K. (2025). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Upaya Mencapai Target Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Bekasi Tahun 2024. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 1022-1043.
- Setyawati, I., Handayani, B. N., & Supinganto, A. (2022). Faktor Risiko Balita Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 6(1), 21-29.
- Singrapati, L., & Astuti, E. (2024). Determinants of stunting prevalence in Nusa Tenggara 2023. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 183-192.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, S., Wahyuni, S., & Andi Latif, S. (2026). Stunting Policy Implementation in Indonesia: A Primary Health Care Perspective. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 15(1), 347-361.
- Supriastuti, E., Nursan, M., & Rakhman, A. (2024). Upayah dan Pendampingan Strategi Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sumbawa Barat Melalui Pengolahan Pangan Lokal Sehat. *Jurnal Siar Ilmuwan Tani*, 5(2), 238-243.
- Suryani, K. I., & Rizqiya, F. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Puskesmas Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar. *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science*, 4(2), 74-83.
- Torres, M., dkk. (2022). Trends in stunting in Indonesia 2013-2018. *Public Health Nutrition*, 25(8), 2345-2356.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021*. UNICEF.
- Winarno, B. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.